



ANALISIS DISPARITAS KEBIJAKAN PUBLIK DAN PRIORITAS KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT (STUDI KASUS: PROGRAM KIP-K DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIMED)

Diva Angel Situmeang¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Tivani Angelina Hutajulu⁴, Riskamawati Harita⁵, Angel A Sihombing⁶, Nazwa Helida⁷

¹⁻⁷)Universitas Negeri Medan, Indonesia

divasitumeang2020@gmail.com¹, parlaungansiahaan@unimed.ac.id²,
novidapurba1@gmail.com³, tivaniangelinaa@gmail.com⁴, riskaharita1@gmail.com⁵,
angelsihombing36@gmail.com⁶, nazwahelida208@gmail.com⁷

Alamat: Jl. William Iskandar Ps V Medan Estate

Korespondensi penulis: divasitumeang2020@gmail.com

Abstract. *The title of the research reflects the potential disparity between the government's policy intentions and the reality faced by the students receiving assistance. KIP-K as a public policy is aimed at helping students from low-income families to access higher education. The data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation, involving five respondents who are KIP-K recipients from the Faculty of Economics at Unimed. The purpose of this study is to describe the implementation of the KIP-K Program at the Faculty of Economics, Unimed, and to analyze the program's impact on the improvement of social welfare for students from economically disadvantaged families. The research results show that the implementation of KIP-K still faces obstacles, such as delays in disbursement and minimal support from the campus. The assistance provided is also not fully aligned with the needs of the students, as some only receive tuition fee exemptions without living expenses. This situation creates disparities among recipients of Scheme 1 and Scheme 2. Therefore, improvements in selection, data validation, and coverage of assistance are urgently needed to make the program fairer and more targeted.*

Keywords: *Public Policy Disparities, Priorities, Society, KIP-K, Student*

Abstrak. Judul penelitian mencerminkan adanya potensi disparitas antara maksud kebijakan pemerintah dengan kenyataan yang dihadapi oleh mahasiswa penerima bantuan. KIP-K sebagai kebijakan publik diarahkan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, di dalam penelitian ini berjumlah lima responden yang terdiri dari mahasiswa penerima KIP-K di Fakultas Ekonomi Unimed. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program KIP-K di Fakultas Ekonomi Unimed serta menganalisis dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan sosial mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP-K masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan pencairan dan minimnya pendampingan dari pihak kampus. Bantuan yang diberikan juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, karena sebagian hanya menerima pembebasan UKT tanpa biaya hidup. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan di kalangan penerima Skema 1 dan Skema 2. Oleh karena itu, perbaikan dalam seleksi, validasi data, dan cakupan bantuan sangat diperlukan agar program lebih adil dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Disparitas Kebijakan Publik, Prioritas, Masyarakat, KIP-K, Mahasiswa

Received: April 02, 2025; Revised: April 12, 2025; Accepted: April 30, 2025

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan ekonomi. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, pendidikan masuk dalam kategori kebutuhan tingkat tinggi yang mendukung pencapaian aktualisasi diri setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tetapi juga sebagai sarana pemutus rantai kemiskinan. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang bertujuan memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Program KIP Kuliah dirancang untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga mereka bisa fokus pada studi tanpa dibebani oleh masalah ekonomi. Program ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan sosial dalam akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata. Namun, dalam pelaksanaannya, KIP Kuliah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan dalam penentuan penerima bantuan. Terdapat kasus di mana mahasiswa dari keluarga yang relatif mampu justru menerima bantuan, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi, verifikasi data, serta kurangnya transparansi dalam distribusi bantuan.

Lebih lanjut, penyimpangan dalam pelaksanaan program juga muncul, seperti manipulasi data oleh oknum, campur tangan pihak dalam, serta ketidaksadaran penerima terhadap hak dan kewajiban mereka. Proses pendaftaran yang rumit serta keterbatasan informasi menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa di daerah terpencil. Intervensi politik, nepotisme, dan birokrasi kampus pun turut memperburuk objektivitas seleksi. Meskipun demikian, program KIP Kuliah tetap memberikan dampak positif bagi banyak mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Banyak dari mereka menyatakan bahwa bantuan ini sangat meringankan beban keluarga dan memberikan motivasi untuk meraih prestasi akademik. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan dampak tersebut, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam penyalurannya.

KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani persoalan publik dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Abdul Wahab (2005) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki sanksi dan berdampak pada sebagian besar masyarakat. Menurut Anderson (2015), kebijakan publik merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam proses pembuatannya, kebijakan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat dan sektor swasta. Kurniati et al. (2015) menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tujuan, nilai yang dianut, sumber daya yang tersedia, kemampuan pelaku kebijakan, kondisi lingkungan, serta strategi yang digunakan. Pendekatan dalam kebijakan publik sendiri dapat bersifat rasional, incremental, maupun politis, tergantung pada konteks dan tantangan yang dihadapi.

Kebijakan Dasar Masyarakat

Kebutuhan dasar adalah elemen penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan dasar mencakup akses terhadap layanan yang layak, merata, dan terjangkau. Mufarizuddin (2023) menekankan bahwa pendidikan menjadi aspek krusial dalam membentuk keseimbangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Alba dan Kurniawan (2019) menyebutkan bahwa pendidikan gratis adalah bukti nyata dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bagi masyarakat miskin. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, pendidikan berada pada level aktualisasi diri, namun dalam realitas masyarakat miskin, ia berubah menjadi kebutuhan primer. Watson (dalam Kasiati dan Rosmalawati, 2016) mengelompokkan kebutuhan dasar manusia ke dalam empat kategori: biofisikal, psikofisik, psikososial, serta interpersonal dan intrapersonal. Lamangida (2015) menambahkan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan sangat vital bagi kelangsungan hidup, sedangkan The Kian Wie menegaskan bahwa kebutuhan pokok bersifat kontekstual dan minimum, tergantung pada kondisi sosial dan geografis suatu masyarakat.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup lebih dari sekadar aspek material; ia juga mencakup kebutuhan interaksi, partisipasi, dan identitas sosial. Asyiah, Adnan, dan Mubarak (2017)

dalam Alba dan Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa pendidikan gratis berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Meski demikian, seperti dicatat oleh Pasaman, implementasi kebijakan pendidikan gratis masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, pengawasan yang lemah, dan birokrasi yang berbelit. Buku-buku politik mencatat bahwa bantuan sosial sering tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin mengalami kesulitan administratif dan keterbatasan akses informasi. Pasaman Ligerty menunjukkan bahwa sistem pengumpulan data masih lemah dan kurang responsif terhadap kondisi lapangan, sehingga diperlukan peran aktif dari aparat sosial dan relawan untuk menjangkau kelompok paling rentan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan juga menjadi penentu efektivitas program. Kualitas pendidikan juga bergantung pada pelatihan guru yang berkelanjutan dan dukungan infrastruktur. Insentif pajak kepada sektor swasta yang berkontribusi dalam pendidikan juga dapat memperkuat keberlanjutan program.

Program KIP-K dalam Konteks Afirmasi Pendidikan

Program KIP Kuliah (KIP-K) merupakan implementasi nyata dari kebijakan afirmasi pendidikan yang bertujuan mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan tinggi. Program ini menyasar mahasiswa dari keluarga miskin, daerah 3T, penyandang disabilitas, serta anak-anak panti asuhan. Amru Alba dan Rudi Kurniawan (2019) menyatakan bahwa program seperti KIP-K merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mendistribusikan sumber daya kepada kelompok marjinal. Menurut Buku Saku KIP Kuliah Merdeka (Kemendikbud, 2021), program ini memberikan pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang langsung disalurkan ke mahasiswa. Gallaher et al. (2009) dalam Asyhabuddin (2022) menegaskan bahwa affirmative action bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan struktural secara historis. Penelitian Matnur Ritonga dkk. (2025) menyoroti pentingnya peran lembaga pembiayaan seperti Puslapdik dan BPPT dalam mendukung pelaksanaan program ini. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui CSR, serta dukungan dari lembaga zakat seperti Baznas dan Lazismu, memperkuat keberlanjutan program. Untuk menghadapi tantangan masa depan, pengembangan sistem pembiayaan yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan

dampaknya terhadap kesejahteraan sosial mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan mahasiswa penerima KIP-K, dan data sekunder berupa dokumen, catatan lapangan, serta bukti visual seperti foto. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap aktivitas mahasiswa, wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka, serta dokumentasi guna melengkapi data visual dan catatan penting lainnya. Subjek penelitian adalah lima mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B stambuk 2023 yang dipilih melalui teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria kesesuaian dengan tujuan penelitian. Meskipun tidak menggunakan hipotesis eksplisit, penelitian ini bertujuan membangun pemahaman berdasarkan realitas empiris. Analisis data dilakukan secara induktif dan tematik, dimulai dari transkripsi data, pengkodean, hingga pengelompokan tema dan penarikan kesimpulan, serta didukung oleh triangulasi sumber dan metode serta member check untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap lima responden penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Fakultas Ekonomi UNIMED, ditemukan bahwa pelaksanaan program ini masih menunjukkan variasi dalam implementasi dan dampaknya terhadap mahasiswa. Dalam hal pencairan dana, sebagian besar responden mengungkapkan kendala administratif, terutama pada awal semester. Masalah tersebut berkaitan dengan keterlambatan pembaruan data, baik dari pihak kampus, mahasiswa, maupun pemerintah pusat, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari kampus. Akibatnya, mahasiswa mengalami ketidakpastian keuangan yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari. Sementara itu, dua responden lainnya melaporkan bahwa mereka tidak mengalami hambatan dalam pencairan dana, namun hanya menerima bantuan pembebasan UKT tanpa tunjangan biaya hidup.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam bentuk bantuan yang diberikan, yang pada akhirnya tetap menimbulkan beban ekonomi bagi sebagian mahasiswa. Dari aspek kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil mahasiswa, seluruh responden menyatakan bahwa program KIP-K sangat membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan dan memungkinkan mereka melanjutkan kuliah. Namun, mereka juga menilai bahwa bantuan yang diberikan belum mampu mencakup seluruh kebutuhan, seperti biaya makan, transportasi,

tempat tinggal, dan perlengkapan studi. Ketidaksesuaian ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa dari luar daerah yang harus menanggung beban ekonomi tambahan. Selain itu, muncul kritik terhadap mekanisme seleksi penerima bantuan yang dinilai belum adil dan transparan, karena masih ditemukan mahasiswa dari keluarga mampu yang justru mendapatkan bantuan, sementara yang lebih layak tidak terpilih. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem verifikasi dan validasi data agar program benar-benar tepat sasaran.

Dalam konteks pengaruh sosial di lingkungan kampus, program KIP-K dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas akses pendidikan dan mempererat solidaritas antarmahasiswa. Namun, perbedaan skema bantuan antara Skema 1 dan Skema 2 menimbulkan dinamika sosial yang tidak selalu harmonis. Mahasiswa penerima Skema 2 cenderung merasa inferior karena tidak mendapatkan bantuan biaya hidup seperti rekan mereka di Skema 1. Hal ini memunculkan jarak sosial yang berpotensi menurunkan kualitas interaksi dan partisipasi mereka dalam kegiatan kampus. Keterbatasan ini juga berdampak pada proses pengembangan diri mahasiswa karena mereka harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam organisasi, seminar, atau pelatihan yang penting bagi pengembangan kapasitas pribadi dan akademik.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program KIP-K telah memberikan akses penting bagi mahasiswa kurang mampu, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Tiga permasalahan utama yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan mahasiswa, ketidakjelasan dalam proses seleksi dan skema bantuan, serta potensi kesenjangan sosial antarpenerima. Hal ini menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam kaitannya dengan teori kebijakan publik oleh Anderson dan pendekatan kebutuhan dasar menurut Maslow, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan publik harus dirancang secara menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, implikasi yang harus diperhatikan adalah perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, perbaikan sistem seleksi yang lebih transparan, dan penyesuaian skema bantuan yang lebih proporsional dan kontekstual. Hanya dengan pendekatan yang lebih adaptif dan akuntabel, tujuan utama dari program KIP-K dalam menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata dapat benar-benar tercapai dan berdampak jangka panjang terhadap penguatan kesejahteraan sosial mahasiswa.

Pembahasan hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai dinamika dalam pelaksanaan Program KIP-K di Fakultas Ekonomi UNIMED, yang secara argumentatif mencerminkan relevansi antara teori kebijakan publik, teori kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, serta kebijakan afirmatif, dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Secara

teoritis, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab (2005) dan Anderson (2015), kebijakan publik yang baik seharusnya mampu merespons kebutuhan masyarakat secara akurat dan adil. Namun, temuan menunjukkan adanya jurang antara perumusan kebijakan dan implementasi KIP-K di lapangan, terutama dalam hal seleksi penerima bantuan, ketidaktepatan jenis bantuan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip rasionalitas dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, relevansi dengan teori kebutuhan dasar, seperti yang diuraikan oleh Maslow dan didukung oleh Mufarizuddin (2023), tampak jelas dalam temuan bahwa mahasiswa penerima KIP-K masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi. Mahasiswa yang hanya mendapatkan bantuan Skema 2 (pembebasan UKT) tetap terbebani oleh biaya hidup harian, sehingga terpaksa bekerja paruh waktu dan mengorbankan waktu belajar. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan dalam konteks masyarakat kurang mampu tidak bisa dipandang hanya sebagai aktualisasi diri, melainkan sebagai kebutuhan primer yang harus dijamin negara secara menyeluruh. Ketidakterpenuhinya kebutuhan ini bahkan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Dari sisi kesejahteraan sosial, teori yang dikemukakan oleh Asyiah et al. (2017) menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi alat integrasi sosial. Namun, fakta menunjukkan bahwa perbedaan skema bantuan dalam KIP-K justru menciptakan kesenjangan sosial antarmahasiswa, di mana penerima Skema 2 merasa kurang dihargai dan mengalami tekanan psikologis. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu oleh Alba dan Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa distribusi bantuan yang tidak merata berpotensi memperlebar ketimpangan sosial jika sistem administrasi dan data tidak dikelola dengan baik. Dengan kata lain, program yang seharusnya memperkuat inklusi sosial justru berisiko menciptakan eksklusi baru jika tidak dilakukan penyesuaian kebijakan.

Dalam konteks teori afirmasi pendidikan, Gallaher et al. (2009) menekankan pentingnya tindakan afirmatif yang tidak hanya memberikan perlakuan sama (equality), tetapi juga perlakuan adil (equity). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan KIP-K masih terlalu prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap realitas mahasiswa di lapangan. Kelemahan dalam sistem seleksi dan verifikasi menyebabkan bantuan tidak selalu jatuh pada mahasiswa yang paling membutuhkan. Hal ini memperlihatkan bahwa afirmasi yang dilakukan belum bersifat holistik dan kontekstual, melainkan masih bersandar pada data administratif yang belum tentu akurat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi sosial dan psikologis mahasiswa sebagai dampak dari ketidakseimbangan skema bantuan KIP-K. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis pencairan dana atau capaian akademik, penelitian ini mengungkap adanya perasaan inferior, eksklusi sosial, hingga keterbatasan partisipasi dalam kehidupan kampus yang dialami oleh mahasiswa penerima Skema 2. Aspek ini menambahkan perspektif baru dalam menilai efektivitas program bantuan pendidikan, yang selama ini cenderung dilihat hanya dari sisi administratif dan akademik.

Dengan demikian, pembahasan ini memperkuat pentingnya reformulasi kebijakan berbasis pendekatan holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dan psikologis mahasiswa. Evaluasi berkala, peningkatan akurasi data, transparansi proses seleksi, serta perluasan cakupan bantuan menjadi langkah strategis agar Program KIP-K dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan keadilan sosial yang sejati.

KESIMPULAN

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang bertujuan membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, namun pelaksanaannya di Fakultas Ekonomi UNIMED masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian serius. Masalah administratif seperti keterlambatan pencairan dana, kesalahan input data, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pendampingan teknis menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran program. Selain itu, ketidaksesuaian antara bentuk bantuan yang diberikan dan kebutuhan riil mahasiswa, terutama pada penerima Skema 2 yang hanya mendapatkan pembebasan UKT, menimbulkan ketimpangan ekonomi sekaligus dampak sosial berupa rasa minder dan keterbatasan partisipasi dalam aktivitas kampus. Oleh karena itu, meskipun KIP-K telah memberikan kontribusi positif dalam membuka akses pendidikan, disparitas antara tujuan ideal dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan pentingnya evaluasi dan reformasi menyeluruh. Disarankan agar sistem administrasi diperbaiki, pendampingan dan sosialisasi ditingkatkan, serta skema bantuan disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa secara lebih adil dan merata. Selain itu, proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan berbasis data valid untuk menjamin ketepatan sasaran, serta kampus perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyediakan ruang aspirasi agar seluruh mahasiswa penerima bantuan merasa dihargai, setara, dan termotivasi untuk berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Alba, A. and Kurniawan, R. (2019) 'Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin "Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara"', UNIMAL Press, 1, pp. 1–128.
- Alviyah, E.N. et al. (2023) 'Beasiswa KIP-K: Apakah Beasiswa Dapat Menjadi Motivasi Belajar Mahasiswa?', *Journal of Creative Student Research*, 1(2),
- Asyhabuddin, A. (2022) 'Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia', *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 3(1),
- Elia, A. and Dkk (2023) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Ilhami, M.W. et al. (2024) 'Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), pp. 462–469. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Khaliq, M.N. (2024) 'E-ISSN : 2792-0876 Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat', 5(1), pp 113–128. Available at: <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1307>.
- Kurniati, I.D. et al. (2015) 'Buku Ajar'.
- Lamangida, T. (2015) 'Pengaruh Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Trisusanti Lamangida Program Studi Administrasi Publik , Universitas Muhammadiyah Gorontalo', *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 193–202.
- Martins, E.K. and Toletina, N.T. (2024) 'Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia', *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(1),
- Pra-sejahtera, K. et al. (2025) 'Pemanfaatan Dana KIPK untuk Mendukung Pendidikan Mahasiswa dari'.
- Rivai, A.B. (2017) 'Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua', *CosmoGo* 1(2) p.266. Available at: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838>.
- Suryani, A.S. (2018) 'Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten', *Jurnal Aspirasi*, 9(1), pp. 35–63. Available at: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.99>